

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari terbatasnya ketersediaan sumber daya (Prisyarsono & Sahara, 2007). Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya yang terbatas membuat manusia tidak bisa memanfaatkannya secara sewenang-wenang. Sumber daya yang dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa terkendali akan memicu kelangkaan sumber daya yang tentunya akan menimbulkan isu yang serius. Maka dari itu, inti permasalahan dalam ekonomi adalah adanya suatu kelangkaan.

Kelangkaan (*scarcity*) dalam ilmu ekonomi adalah suatu kondisi ketika sumber daya atau dalam hal ini faktor produksi yang tersedia tidak mampu memenuhi keinginan manusia, atau sumber daya yang tersedia hanya mampu untuk memproduksi sebagian kecil dari kebutuhan akan barang dan jasa (Nasruddin, 2007). Salah satu penyebab kelangkaan adalah belum terkelolanya faktor-faktor produksi dengan baik. Melimpahnya sumber daya alam bukanlah sebuah jaminan semua kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

Ilmu ekonomi berusaha memberikan pedoman tentang perilaku atau pilihan (*choice*) manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas agar tercipta kesejahteraan. Hal tersebut selaras dengan definisi ilmu ekonomi yang disampaikan oleh Adam Smith bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menyelidiki sifat-sifat dan sebab-sebab dari terciptanya suatu kemakmuran (Amrizal, 2006).

Menurut Samuelson, dalam ilmu ekonomi terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan agar terciptanya kesejahteraan. Tiga masalah pokok yang harus dihadapi tersebut yaitu *what?*, *how?*, dan *for whom?*. *What* menjelaskan tentang barang apa yang harus diproduksi. Barang yang diproduksi tentu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *How* berusaha mengupas langkah selanjutnya setelah *what*, yaitu bagaimana proses atau prosedur dalam memproduksi barang tersebut. Hal ini berkaitan dengan teknologi-teknologi yang akan digunakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi. Setelah itu, masalah pokok yang ketiga (*for whom*) menitikberatkan pada konsumen karena *for whom* menjelaskan tentang kepada siapa barang yang telah diproduksi akan dijual (Prisyarsono & Sahara, 2007).

Mankiw (2018) dalam bukunya “*Principles of Microeconomics Eight Edition*” menjelaskan tentang 10 (sepuluh) prinsip ekonomi dalam setiap pengambilan keputusan.

1) Orang Menghadapi *Trade off*

Prinsip ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan, manusia harus membuat pengorbanan. Dengan

kata lain, terjadi pertukaran (*trade off*) antara barang dan/atau jasa yang dibutuhkan manusia dengan apa yang mereka miliki. Misalnya ketika seseorang sedang menginginkan makanan. Ia harus merelakan sebagian uang yang dimiliki untuk membeli makanan tersebut.

- 2) Biaya adalah jumlah yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu

Prinsip ini memberikan pedoman bahwa dalam mengambil suatu keputusan atau menentukan pilihan, manusia setidaknya harus membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif pilihan yang mereka tentukan. Dalam hal ini, biaya merupakan sesuatu yang dikorbankan dalam menentukan suatu alternatif pilihan atau juga disebut biaya kesempatan (*opportunity cost*).

- 3) Orang rasional tentu akan mempertimbangkan batasan-batasan

Dalam setiap perubahan marginal (*marginal changes*), setidaknya manusia bersikap rasional yaitu membandingkan keuntungan marginal yang didapatkan dengan biaya marginal yang dikeluarkan. Ketika suatu alternatif perubahan marginal misalnya penambahan produk yang akan dijual menghasilkan utilitas yang lebih kecil dari tingkat utilitas sebelumnya, maka alternatif penambahan produk tersebut tidak perlu diambil.

- 4) Orang akan merespons terhadap insentif

Perilaku manusia pada prinsipnya dipengaruhi oleh adanya insentif. Perubahan marginal dalam biaya dan manfaat memotivasi manusia dalam mengambil pilihan. Seperti pada prinsip sebelumnya, manusia tentu akan memilih suatu alternatif ketika alternatif tersebut mampu memberikan keuntungan marginal yang lebih besar dari biaya marginalnya.

5) Perdagangan akan menguntungkan semua pihak

Perdagangan antara dua pihak atau lebih sebenarnya akan memberikan keuntungan, karena perdagangan akan mendorong masing-masing pihak menentukan spesialisasinya dalam memproduksi yang disesuaikan dengan keahlian mereka.

6) Pasar adalah cara yang tepat untuk mengatur kegiatan ekonomi

Pasar merupakan tempat para pelaku ekonomi mengalokasikan sumber dayanya. Di dalam pasar, rumah tangga berhak menentukan akan bekerja di perusahaan mana dan akan membeli barang/jasa apa. Sedangkan perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan dijual.

Adam Smith menjelaskan bahwa semua pelaku ekonomi baik rumah tangga mau pun perusahaan berinteraksi di pasar seolah-olah dituntun oleh tangan tak terlihat (*invisible hand*) berupa harga. Tidak bisa dipungkiri, harga merupakan unsur yang dipertimbangkan oleh rumah tangga mau pun perusahaan dalam mengambil keputusan. Sehingga, secara tidak langsung harga-harga di pasar yang mengatur kegiatan ekonomi dan memandu pelaku ekonomi dalam mencapai kesejahteraannya.

7) Pemerintah terkadang meningkatkan *outcomes* dari pasar

Prinsip ini menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ketika terjadi kegagalan pasar (*market failure*), pemerintah dapat melakukan intervensi. Kegagalan pasar sendiri merupakan kondisi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan tidak mampu

memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi. Contoh penyebab dari kegagalan pasar adalah eksternalitas (*externality*) dan kekuasaan pasar (*market power*).

- 8) Standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa

Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa atau juga disebut produktivitas (*productivity*) berhubungan dengan standar hidup (*standard of living*) di negara tersebut. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi akan berimbas pada standar hidup yang lebih tinggi. Secara tidak langsung, tingkat produktivitas memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

- 9) Jika uang yang beredar cukup banyak, akan terjadi inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika harga-harga barang dan jasa secara keseluruhan mengalami peningkatan. Inflasi disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Jumlah uang yang terlalu banyak membuat nilai uang itu sendiri menurun, sehingga harga barang dan jasa terasa lebih mahal.

- 10) Ada *trade off* jangka pendek antara inflasi dan pengangguran

Prinsip ini dapat tergambarkan dalam *Phillips Curve*, yaitu sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Secara umum, kurva tersebut menjelaskan bahwa stabilitas harga dan kesempatan kerja sulit terjadi secara bersamaan. Ketika menginginkan tingkat pengangguran yang rendah, maka negara harus menanggung konsekuensi akan tingkat inflasi yang tinggi.

Hukum yang paling dasar dalam ilmu ekonomi adalah adanya hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Hampir setiap peristiwa ekonomi terjadi karena efek dari interaksi antara permintaan dan penawaran (Priyono & Ismail, 2012). Permintaan menggambarkan jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Kondisi permintaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah harga, jumlah penduduk, tingkat pendapatan, iklim, dll. Sedangkan penawaran merupakan gambaran jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang disediakan oleh para penjual. Tak hanya permintaan, penawaran pun dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, harga bahan baku, barang atau jasa pengganti, dll. Fungsi pasar pada dasarnya adalah menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) harga yang terjadi karena seimbang atau idealnya pasokan dan permintaan untuk barang dan jasa.

2.2 Konsep Kewilayahan

Dalam konsep regional, terdapat beberapa istilah kewilayahan yang sering ditemui. Prisyarsono & Sahara (2007) menyebutkan beberapa istilah kewilayahan seperti sebagai berikut.

2.2.1 Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang diartikan sebagai wadah yang terdiri dari komponen darat, laut, dan udara termasuk ruang yang berada di dalam bumi, tempat manusia dan makhluk lain menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.

2.2.2 Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur-unsur yang terikat dengan batas berupa aspek administratif atau pun fungsional. Sjafrizal dalam Prisyarsono dan Sahara (2007) menyebutkan beberapa konsep wilayah yang lazim digunakan, yaitu sebagai berikut.

2.2.2.1 Wilayah Homogen

Wilayah homogen merupakan wilayah yang dianggap memiliki kesamaan karakteristik berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria kesamaan tersebut dapat berupa kegiatan ekonomi, kondisi geografi, dan sebagainya. Misalnya, wilayah-wilayah yang berada di Jawa Tengah bagian selatan, tepatnya yang berada di sekitar pantai selatan Jawa. Mayoritas masyarakat di wilayah-wilayah tersebut berprofesi sebagai nelayan. Maka dari itu, wilayah di sekitar pantai selatan dapat dikatakan sebagai wilayah homogen karena memiliki kesamaan karakteristik dalam bidang ekonomi.

Tak hanya itu, wilayah yang berada dalam suatu wilayah homogen akan memiliki kesamaan respon atau reaksi terhadap suatu perubahan. Misalnya, ketika musim hujan datang dan ombak di pantai selatan Jawa cukup tinggi, maka pendapatan masyarakat yang berada di wilayah dekat pantai akan menurun secara bersamaan. Hal tersebut dikarenakan para nelayan cukup kesulitan mencari ikan.

2.2.2.2 Wilayah *Nodal*

Wilayah *nodal* merupakan wilayah yang memiliki ketergantungan antara wilayah pusat dan wilayah di sekitarnya. Wilayah pusat disebut juga sebagai inti,

sedangkan wilayah di sekitarnya disebut sebagai *hinterland*. Ketergantungan ini tidak hanya ketergantungan wilayah *hinterland* terhadap wilayah pusat, namun juga berlaku sebaliknya. Wilayah pusat membutuhkan keberadaan wilayah *hinterland*, karena wilayah *hinterland* juga berperan sebagai pendukung aktivitas ekonomi wilayah pusat. Konsep wilayah nodal ini tergambar dalam wilayah DKI Jakarta sebagai wilayah inti yang dikelilingi oleh wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sebagai wilayah *hinterland*.

2.2.2.3 Wilayah Administratif

Wilayah administratif adalah wilayah yang memiliki batas-batas berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik. Contoh dari wilayah administrative ini adalah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Batas-batas wilayah tersebut secara jelas tertulis dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Konsep wilayah administratif ini merupakan konsep kewilayahan yang paling sering digunakan. Ketika disebut kata “wilayah”, mayoritas mengacu pada wilayah administratif.

2.2.2.4 Wilayah Perencanaan

Jenis wilayah yang terakhir adalah wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merujuk pada wilayah yang secara fungsional, batas-batasnya ditetapkan dalam rangka perencanaan. Contoh dari penerapan wilayah perencanaan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu.

2.2.3 Daerah dan Kawasan

Meskipun tidak disebutkan secara langsung daerah dan kawasan merupakan bagian dari konsep kewilayahan, Prisyarsono & Sahara (2007) dalam

bukunya membahas dua istilah ini. Pada praktiknya, kata “daerah” dan “kawasan” sering dianggap memiliki makna yang sama. Namun, sebetulnya dua kata tersebut memiliki arti masing-masing. Daerah merujuk pada wilayah yang batasnya berupa aspek administratif, misalnya adalah Kabupaten Purbalingga. Sedangkan kawasan merujuk pada wilayah yang batasnya berupa aspek fungsional dan terdapat kesamaan karakter secara fisik, misalnya Kawasan Hutan Lindung Gunung Slamet. Secara fungsi, kawasan tersebut ditetapkan untuk melindungi flora dan fauna yang berada di sekitar Gunung Slamet.

2.3 Ekonomi Wilayah

Studi mengenai ekonomi wilayah juga sering disebut sebagai ilmu ekonomi regional. Ridwan (2016) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi regional (IER) merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Seperti yang disampaikan oleh Samuelson, ilmu ekonomi memiliki 3 masalah pokok utama, yaitu *what*, *how*, dan *for whom*. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonom-ekonom lain seperti Domar, Harrod, Sollow, dan Swan menambahkan permasalahan *when* yang membahas mengenai waktu pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tepat.

Dalam ilmu ekonomi wilayah ini, terdapat satu permasalahan lainnya yang sering diabaikan pada analisis ekonomi tradisional, yaitu *where* (Prisyarsono & Sahara, 2007). Permasalahan ini ditambahkan karena kemampuan wilayah dalam menghasilkan *output* berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Artinya, ekonomi wilayah dalam

pembahasannya tidak hanya terkonsentrasi di bidang ilmu ekonomi saja, tetapi juga memasukkan unsur-unsur yang ada di bidang ilmu geografi.

Tidak seperti ilmu ekonomi yang lebih fokus membahas individu dalam memenuhi kebutuhannya, ilmu ekonomi wilayah menitikberatkan kepada suatu wilayah beserta kemampuan dan potensinya dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Tidak semua wilayah memiliki kestabilan sumber daya maupun pertumbuhan ekonomi. Ada wilayah yang memiliki kestabilan di bidang energi, namun lemah di bidang pertanian. Begitu pun dengan kondisi yang lainnya. Tentunya dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang ideal dari masing-masing wilayah demi mewujudkan kestabilan hingga percepatan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan dan potensinya. Dalam hal ini, peran studi ilmu ekonomi wilayah dibutuhkan.

Ekonomi wilayah memiliki peran yang cukup penting dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi regional memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pada umumnya tidak berbeda jauh dari tujuan utama kebijakan ekonomi. Fergusan dalam Prisyarsono & Sahara (2007) mengungkapkan 3 tujuan utama kebijakan ekonomi, yaitu sebagai berikut.

1) *Full Employment*

Studi ilmu ekonomi berusaha agar suatu kebijakan ekonomi mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Lapangan pekerjaan yang tersedia diusahakan dapat terpenuhi oleh para pekerja atau setidaknya tingkat pengangguran bisa mencapai angka yang rendah. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2) *Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi)

Selain menyediakan lapangan kerja, ekonomi wilayah atau ekonomi regional berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki kehidupan masyarakat atau meningkatkan pendapatan.

3) *Price Stability* (Kestabilan Harga)

Ekonomi regional berusaha mewujudkan kestabilan harga dalam perekonomian. Hal ini dilakukan agar tercipta rasa aman dan tenteram pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena harga yang berfluktuasi tentunya akan membuat membingungkan masyarakat dalam mengambil keputusan.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan jumlah *output*, yang diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Dalam pengertian tersebut, pertumbuhan ekonomi ditekankan pada kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi atau menghasilkan *output*. PDB dan PDRB merupakan contoh instrument yang menggambarkan kemampuan wilayah dalam menghasilkan *output*. PDB menggambarkan *output* dalam skala nasional, sedangkan PDRB menggambarkan *output* dalam skala yang lebih kecil, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1981). Secara keseluruhan,

Boediono menekankan pada tiga aspek, yaitu proses, *output perkapita*, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu peristiwa yang terjadi secara instan. Kenaikan *output* terjadi setelah melalui beberapa tahap yang terstruktur. Kemudian Boediono juga menambahkan variabel waktu ke dalam pengertiannya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika proses pertumbuhan kuantitas *output* berlangsung dalam jangka panjang. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi secara berkelanjutan hingga beberapa tahun yang akan datang dan tidak hanya pada suatu periode waktu tertentu.

Berkaca dari pengertian pertumbuhan ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan sebuah proses penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah tertentu yang berlangsung dalam jangka panjang. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kemakmuran di suatu wilayah (Ridwan, 2016).

2.4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ridwan (2016) dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi Regional” menjelaskan bahwa terdapat beberapa aliran dan teori dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut.

2.4.1.1 Teori Pertumbuhan Regional

2.4.1.1.1 Aliran Klasik

Aliran ini dipopulerkan oleh bapak ekonomi dunia Adam Smith pada abad ke-18. Konsep dalam aliran ini adalah pertumbuhan ekonomi terjadi karena disebabkan oleh faktor kemajuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Teknologi yang semakin maju membuat tingkat produktivitas tenaga kerja lebih

baik. Hal tersebut akan menimbulkan efek berlipat (*multiple effect*) yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan pertumbuhan penduduk memicu hukum penambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*). Berikut beberapa tokoh pengikut aliran klasik dan pemikirannya.

1) Adam Smith

Menurutnya, untuk melangsungkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja. Spesialisasi dalam proses produksi akan memicu penemuan alat atau teknologi yang selanjutnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Penduduk selain sebagai pasar juga berperan sebagai sumber tabungan yang dapat digunakan sebagai modal dalam peningkatan kualitas teknologi proses produksi. Atas proses yang berkesinambungan tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat.

2) David Ricardo

David Ricardo menghubungkan kemakmuran masyarakat dengan harga sewa lahan. Menurutnya, jumlah penduduk dan akumulasi modal yang semakin bertambah akan menyebabkan ketersediaan tanah yang subur menjadi berkurang. Maka harga sewa tanah yang subur menjadi lebih tinggi dan pengolahan tanah yang benar dapat menghasilkan keuntungan.

3) Robert Malthus

Robert Malthus memiliki pemikiran yang cenderung pesimistik. Menurutnya, kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat permintaan bahan pangan. Tingkat pertumbuhan penduduk mengikuti deret

ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Ia memprediksi akan terjadi ketimpangan yang besar antar jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan. Hal tersebut akan menurunkan tingkat kemakmuran penduduk.

4) IB. Say

Berbeda dengan Robert Malthus, IB. Say memiliki pemikiran yang optimistik. Ia mengungkapkan sebuah hukum pasar *supply creates its own demand*. Hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap barang yang dihasilkan produsen, akan memiliki konsumen atau pembelinya. Maka dari itu tidak akan terjadi kelebihan produksi (*over production*).

2.4.1.1.2 Aliran Neoklasik

Dalam aliran neoklasik, tingkat pertumbuhan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu akumulasi modal, penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Model neoklasik telah mengaitkan faktor mobilitas dalam pembahasannya. Arus modal dapat berpindah dari daerah yang tingkat upahnya tinggi ke daerah yang tingkat upahnya rendah. Hal tersebut terjadi karena sesuai dengan prinsip ekonomi yang memaksimalkan keuntungan (*return*).

Neoklasik juga menjelaskan bahwa intervensi pemerintah tidak terlalu diperlukan. Karen ketika terjadi ketidakseimbangan, dalam jangka panjang tetap akan muncul suatu kekuatan tandingan (*counter forced*). Kekuatan tandingan tersebut akan membawa kembali kepada kondisi keseimbangan.

2.4.1.1.3 Aliran Keynes dan Pasca Keynes

Aliran ini muncul pada saat masa depresi yaitu sekitar tahun 1930. John Maynard Keynes sebagai pelopor aliran keynes pada mulanya menekankan pada permasalahan permintaan efektif (*effective demand*). Aliran ini menjelaskan bahwa karena upah yang bergerak lamban, maka sistem kapitalisme secara otomatis tidak dapat menuju keseimbangan penggunaan tenaga kerja secara penuh (*full employment equilibrium*), melainkan yang terjadi adalah *equilibrium underemployment*. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kebijakan fiskal atau moneter untuk meningkatkan permintaan agregat.

Kemudian aliran pasca keynes memperluas pembahasan teori pada aliran keynes hingga meliputi teori *output* dan kesempatan kerja dalam jangka panjang yang dilakukan dengan menganalisis fluktuasi yang terjadi dalam jangka pendek. Berikut beberapa permasalahan penting dalam aliran pasca keynes.

- 1) Syarat yang diperlukan demi mempertahankan pendapatan yang stabil pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi ataupun inflasi.
- 2) Pertambahan pendapatan pada tingkat tertentu yang dapat mencegah inflasi.

2.4.1.2 Teori Basis Ekspor

Dalam teori basis ekspor, aktivitas perekonomian dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor basis dan nonbasis. Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang berorientasi pada kegiatan ekspor baik barang maupun jasa keluar batas wilayah perekonomian. Sedangkan sektor nonbasis memiliki lingkup

pemasaran di wilayah lokal. Kegiatannya pun memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa di dalam batas wilayah perekonomian.

Meskipun teori ini sangat sederhana karena sebatas membagi perekonomian menjadi dua sektor, namun teori ini cukup bermanfaat terutama dalam memperjelas struktur aktivitas basis ekonomi suatu wilayah yang selanjutnya dapat sebagai pertimbangan upaya spesialisasi. Teknik yang biasa digunakan dalam menganalisis basis ekonomi suatu wilayah adalah kuosien lokasi (*location quotient* /LQ). Faktor-faktor yang dapat digunakan dalam teknik ini misalnya jumlah tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

2.4.1.3 Teori Sektor

Teori sektor dikembangkan oleh Clark-Fisher. Dalam hipotesisnya, dikatakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan dibarengi dengan penurunan kuantitas sumber daya yang digunakan atau sektor primer yang dalam hal ini diilustrasikan oleh sektor pertanian. Di sisi lain, terjadi kenaikan pada sektor sekunder yang diilustrasikan oleh sektor industri manufaktur dan sektor tersier yang diilustrasikan oleh industri jasa.

Laju pertumbuhan yang terjadi pada sektor yang mengalami perubahan (*sector shift*) dianggap sebagai faktor yang paling menentukan dalam perkembangan wilayah. Perubahan pada sektor tersebut dapat dianalisis dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, jika elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap industri manufaktur dan jasa lebih tinggi dari sektor pertanian, maka naiknya pendapatan masyarakat akan diikuti oleh perpindahan sumber daya dari sektor pertanian ke industri manufaktur dan jasa. Begitu pun pada

sisi penawaran, tingginya produktivitas dan kemajuan pada industri manufaktur dan jasa menimbulkan realokasi sumber daya tenaga kerja dan modal.

2.4.1.4 Teori Kausasi Kumulatif

Pada tahun 1955, Gunnar Myrdal mengemukakan kesimpulan yang pada intinya menceritakan dunia yang mengalami ketidakmerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang semakin stabil dibarengi oleh lambannya perkembangan negara-negara terbelakang. Kondisi tersebut dalam teori ini disebut sebagai kausasi sirkuler kumulatif. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka dapat menimbulkan efek penguasaan (*backwash effects*) oleh pihak-pihak dengan ekonomi yang mapan dan tidak terjadi perambatan perkembangan ekonomi (*spread effects*). Strategi pemerintah dalam hal ini diperlukan demi melemahkan *backwash effects* dan memperkuat *spread effects*. Karena pada kenyataannya, ketidakmerataan atau ketimpangan ekonomi ini tidak dikehendaki oleh semua negara.

2.4.1.5 Teori Lokasi dan Aglomerasi

Von Thunen dalam teorinya menghubungkan antara perbedaan lokasi dengan penggunaan lahan. Menurutnya, jenis pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh tingkat harga sewa lahan. Seperti yang diketahui bahwa harga sewa lahan semakin tinggi jika semakin dekat dengan pusat kota. Maka dari itu, kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan tertinggi akan diletakkan di dekat pusat kota karena dinilai lebih mampu membayar harga sewa lahan yang tinggi.

Selanjutnya, teori Von Thunen memicu munculnya teori-teori lain salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh Alfred Weber. Weber menekankan

dua faktor utama dalam pertimbangan lokasi, yaitu transportasi dan tenaga kerja. Dari teorinyalah kemudian studi kewilayahan semakin berkembang. Ia juga merupakan ahli teori lokasi pertama yang membahas aglomerasi atau pusat-pusat kegiatan ekonomi.

2.4.1.6 Teori Tempat Sentral

Teori ini diperkenalkan oleh Christaller, seorang ahli ilmu bumi yang kemudian dikembangkan lagi oleh August Losch. Christaller mengembangkan modelnya dari tingkat atas atau skala nasional. Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah berbentuk segi enam dan memiliki pusat. Besar atau kecilnya segi enam menyesuaikan dengan tingkat wilayahnya. Dalam model tersebut, terdapat keterkaitan antara wilayah yang tingkatnya lebih tinggi dengan wilayah yang tingkatnya lebih rendah. Sedangkan Losch mengembangkan modelnya dari skala yang kecil. Menurutnya, wilayah perdagangan dimulai dari pasar sederhana, kemudian membentuk suatu jaringan antar wilayah pasar, dan pada akhirnya terbentuk sistem wilayah pasar yang saling terhubung.

2.4.1.7 Teori Kutub Pertumbuhan

Pembahasan ekonomi dalam teori-teori klasik masih memakai asumsi bahwa semua kegiatan dilaksanakan pada satu permukaan yang sama. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan geografis, fasilitas, dan yang lainnya antar wilayah. Maka dari itu, muncullah teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh Francois Perroux. Ia menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di semua wilayah, melainkan hanya pada beberapa wilayah tertentu dengan variabel dan intensitas yang berbeda.

Perreoux mengungkapkan bahwa terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu dominasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang mendominasi ekonomi pada dasarnya memiliki kedudukan oligopolistik dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kegiatan ekonomi. Selaras dengan teori tata ruang ekonomi, (*economic space theory*), industri pendorong dianggap sebagai elemen yang vital untuk memulai pembangunan.

2.4.1.8 Teori Pembangunan Polarisasi

Polarisasi merupakan suatu konsentrasi yang terdiri dari kelompok, kekuatan, atau kepentingan mengenai beberapa keadaan yang berlainan. Teori ini diangkat dari model yang disampaikan oleh Ralph Dahrendorf tentang teori perubahan sosial. Dalam modelnya, dijelaskan bahwa pusat utama atau wilayah inti (*core region*) merupakan suatu subsistem masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi untuk melakukan perubahan yang inovatif, sedangkan wilayah sekelilingnya (*periphery regions*) merupakan subsistem juga yang pembangunannya dipengaruhi oleh wilayah inti.

2.5 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam beberapa pembahasan sering kali dipersamakan maknanya. Namun, sebenarnya kedua permasalahan tersebut memiliki definisi yang berbeda (Purba, et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi seperti yang dibahas pada poin sebelumnya lebih mengarah pada kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi membicarakan bahasan-bahasan yang lebih luas.

Sirojuzilam (2009) menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi bersifat multidimensional dan merupakan langkah suatu daerah yang mengandalkan kerjasama antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat.. Serangkaian kegiatan yang dilakukan adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan atau ketimpangan sosial (*disparity*), dan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud ketika terjadi kenaikan jumlah *output* per kapita dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kebijakan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi menjadi topik yang sering diperbincangkan. Zaman yang semakin maju membuat masing-masing daerah berusaha untuk mengupayakan pembangunan ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah memiliki tujuan yaitu mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk dan mencapai stabilitas ekonomi daerah (Purba, et al., 2021). Lapangan kerja memang memegang peran yang penting dalam pembangunan karena merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Tujuan pembangunan dengan meningkatkan lapangan kerja harus dibarengi dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Semua pihak harus bersatu memberikan dukungannya dengan mengeluarkan ide atau menciptakan inovasi lapangan kerja dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh daerah.

Jumlah dan jenis peluang kerja yang ideal akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang kemudian akan mendorong kemajuan di bidang-bidang lain. Penambahan lapangan kerja pada prinsipnya dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan kondisi tersebut, dapat tercipta suatu kestabilan ekonomi dari sisi masyarakat karena mereka mendapatkan kesejahteraan yang tercipta dari pendapatan.

2.6 Pandemi Covid-19

2.6.1 Gambaran Umum Pandemi Covid-19

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Selain pandemi, terdapat beberapa istilah lain yaitu endemi dan epidemi. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Sedangkan epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Dalam hal ini, pandemi memiliki jangkauan area yang lebih luas, karena wilayah geografi yang terjangkau suatu penyakit dapat mencapai seluruh negara atau benua.

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya suatu penyakit yang mirip dengan pneumonia yang disebabkan oleh sebuah virus. Penyakit ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Meskipun banyak pro dan kontra tentang asal mula virus corona, berdasarkan beberapa pasien kasus pertama, kemunculan virus ini dikaitkan dengan sebuah pasar hewan basah di Kota Wuhan (Rothan & Byrareddy, 2020). Penyakit ini awalnya disebut sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV) namun kemudian World Health Organization

(WHO) atau Badan Kesehatan Dunia mengubahnya menjadi *Coronavirus Disease* (Covid-19). Penyebab penyakit ini merupakan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Susilo, et al., 2020).

Penyebaran Covid-19 ini dapat dikatakan sangat cepat. Belum sampai satu bulan, wabah penyakit ini telah menyebar ke beberapa negara di sekitar Cina seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Hingga tahun 2020, tepatnya pada tanggal 9 Maret, WHO menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi. Hal tersebut dikarenakan virus corona telah menyebar hingga hampir di seluruh dunia. Penambahan jumlah pasien Covid-19 yang cukup cepat ini tak lain adalah karena penularan penyakit ini juga cukup mudah. Virus SARS-CoV-2 dapat menyebar dari manusia ke manusia dengan media berupa *droplet* atau cairan yang keluar saat batuk atau bersin (Susilo, et al., 2020).

2.6.2 Kebijakan Pemerintah dan Vaksinasi

Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi penyebaran virus SARS-CoV-2 ini. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah dengan kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan, seperti penggalakan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan mobilitas sosial, dan pelaksanaan vaksinasi. Selama 2 tahun pandemi berlangsung, cukup banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada awal pandemi Covid-19 mulai melanda, pemerintah membentuk sebuah tim penanganan pandemi Covid-19 yang disebut sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian direvisi pada

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Dalam Kepres Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjalankan tugasnya dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui *refocusing* dan realokasi anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah.

Demi mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam peraturan tersebut dijelaskan setidaknya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat-tempat umum dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sejak saat itu, metode kegiatan belajar mengajar, pekerjaan, atau yang lainnya sudah mulai menerapkan sistem dalam jaringan (*daring*).

Untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, pemerintah atas rekomendasi World Health Organization (WHO) mengeluarkan kebijakan terkait dengan vaksinasi Covid-19. Kebijakan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Vaksinasi merupakan aktivitas pemberian vaksin terhadap seseorang. Sedangkan vaksin sendiri memiliki arti sebuah produk biologi berisi mikroorganisme dan zat lainnya yang jika diberikan kepada seseorang akan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), vaksin diberikan dengan jumlah 1-2 dosis menyesuaikan dengan jenis vaksin yang digunakan. Per 23 Januari 2022, jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia di antaranya adalah; *Sinovac, Astrazeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer* dan *BioNTech, Novavax, Sputnik V, Janssen, Convidecia*, dan *Zifivax* (Fadli, 2022).

Pemberian 1-2 dosis primer vaksinasi pada kenyataannya tidak menunjukkan tingkat efektivitas yang diharapkan. Kasus Covid-19 terus bertambah seiring dengan munculnya varian-varian baru hasil dari mutasi virus SARS-CoV-2. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (*Booster*). Vaksinasi Dosis Lanjutan adalah kegiatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan setelah seseorang memperoleh vaksinasi primer dengan dosis lengkap. Seperti pada vaksinasi primer, vaksinasi dosis lanjutan ini juga memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kekebalan tubuh.

2.6.3 Mutasi Virus Covid-19

Hingga tahun 2022, pandemi belum juga berakhir. Awetnya pandemi Covid-19 ini tak lain adalah karena virus SARS-CoV-2 yang terus melakukan mutasi membentuk varian-varian baru. Proses mutasi merupakan respon virus terhadap lingkungan atau kondisi di sekitarnya yang dilakukan melalui perubahan genom secara spontan, sehingga akan memengaruhi seleksi alam terhadap keberadaan virus tersebut. Mutasi yang terjadi dapat menguntungkan atau

merugikan virus sendiri. Mutasi yang merugikan virus pada akhirnya dapat menyebabkan mutasi tersebut hilang dari populasi. Sedangkan mutasi yang bersifat menguntungkan virus dapat menyebar kembali dalam populasi. Beberapa penemuan mutasi yang menguntungkan virus ini disinyalir mampu menghindari kekebalan tubuh alami maupun vaksinasi, bahkan diperkirakan mempunyai ketahanan terhadap pengobatan tertentu.

WHO Bersama mitranya terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap evolusi dari SARS-CoV-2. WHO memiliki sebuah tim yang berisi kelompok kerja evolusi virus *Technical Advisory Group on Virus Evolution* (TAG-VE), jaringan laboratorium rujukan Covid-19 WHO, perwakilan GISAIID, Nextstrain, Pango, dan ahli tambahan virologi, nomenklatur mikroba dan komunikasi dari berbagai negara. Tim tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai macam mutasi yang muncul dari virus SARS-CoV-2 agar mempermudah pembahasan dalam forum-forum diskusi atau pengambilan kebijakan dari pemerintah. Berikut beberapa klasifikasi mutasi virus SARS-CoV-2 berdasarkan website resmi WHO.

2.6.3.1 *Variant of Concern* (VOC) (Update Informasi Terbaru)

Per 3 Mei 2022, WHO menetapkan dua varian yang dikategorikan sebagai VOC.

2.6.3.1.1 Delta

Varian B.1.617.2 atau juga disebut varian Delta ini merupakan salah satu bentuk mutasi virus SARS-CoV-2. Di antara semua varian, varian Delta ini merupakan mutan yang paling berbahaya. Orang yang terinfeksi varian ini 2 kali

lebih memungkinkan untuk memerlukan pengobatan atau penanganan (Santoso, 2022). Layaknya virus asli dari Covid-19, varian Delta juga telah menyebar hingga berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada periode 1 Januari – 13 November 2021, di Indonesia sendiri terdapat 4.732 kasus Covid-19 varian Delta yang didominasi oleh Pulau Jawa dengan 2.525 kasus atau 53% dari total kasus yang terjadi (Annur, 2021).

2.6.3.1.2 Omicron

Varian B.1.1.529 atau yang biasa disebut sebagai varian Omicron ini adalah varian yang masih dikategorikan sebagai VOC. Varian ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada 24 November 2021 dan kini telah menyebar ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, varian Omicron pertama kali terdeteksi pada 16 Desember 2021 (Satgas Covid-19, 2021).

Varian ini menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan memberikan dampak negatif secara epidemiologi. Penularan varian Omicron juga cukup cepat karena varian ini dinilai cukup kebal terhadap vaksin. Bahkan penelitian menunjukkan 2 dosis vaksin *Pfizer* hanya memiliki tingkat efektivitas perlindungan sebesar 33% terhadap infeksi varian Omicron. Namun, dampak dari infeksi varian ini tidak terlalu berat. Derajat keparahan yang ditimbulkan cukup ringan. Penderita Omicron memiliki kebutuhan perawatan di rumah sakit yang lebih rendah dari varian lainnya (Amalia, 2021).

2.6.3.2 *Variant of Interest* (VOI)

VOI merupakan kelompok varian mutasi SARS-CoV-2 yang disinyalir atau telah diketahui mempengaruhi karakteristik virus seperti terkait dengan penularan,

keparahan, dan kekebalan. Selain itu, kelompok varian ini menyebabkan penularan yang signifikan di banyak negara. Berdasarkan data dari WHO per 3 Mei 2022, tidak ada varian yang dikategorikan sebagai *varian of interest* (VOI). Beberapa varian yang pernah dikategorikan sebagai VOI adalah; Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu (World Health Organization, 2022).

2.7 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor unggulan pada dasarnya adalah sektor yang keberadaannya dalam suatu wilayah pada saat ini memiliki peran yang besar terhadap perkembangan perekonomian di wilayah tersebut. Sektor tersebut dapat memiliki peran yang besar karena memiliki keunggulan-keunggulan atau kriteria-kriteria yang tidak dimiliki oleh sektor lainnya. Karena perannya, sektor ekonomi unggulan seringkali menjadi tumpuan kegiatan perekonomian wilayah. Jika dioptimalkan, suatu sektor dapat menjadi label perekonomian suatu wilayah.

Sektor unggulan disinyalir berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah. Hal tersebut tidak lepas karena di daerah tersebut terdapat faktor-faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yang antara lain terdiri atas; akumulasi modal, pertumbuhan tenaga, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Peluang investasi juga lebih mudah untuk diciptakan terutama dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Rachbini, 2001).

Rachbini (2001) menjelaskan terdapat empat syarat agar suatu sektor dikatakan sebagai sektor prioritas atau unggulan, yaitu :

- 1) Sektor ekonomi tersebut setidaknya mampu menghasilkan produk dengan permintaan yang besar sehingga laju pertumbuhan sektor tersebut berkembang lebih cepat akibat adanya efek tingginya permintaan tersebut.
- 2) Revolusi teknologi yang meningkatkan tingkat efektivitas kegiatan produksi membuat fungsi produksi bergeser ke kanan sehingga kuantitas produksi menjadi lebih banyak.
- 3) Terjadi peningkatan iklim investasi dari hasil-hasil produksi sektor unggulan tersebut
- 4) Sektor tersebut harus terus berkembang dan mendorong sektor-sektor lainnya menjadi lebih maju.

Penentuan sektor unggulan menjadi sangat penting. Masing-masing daerah harus mampu memahami dan menganalisis karakteristiknya agar sektor ekonomi yang diprioritaskan memang benar merupakan sektor unggulan dan memenuhi 4 kriteria menurut Rachbini di atas. Mengingat diterapkannya asas desentralisasi dan masing-masing daerah memiliki hak otonomi daerah, maka penentuan sektor ekonomi unggulan menjadi tanggung jawab daerah atau wilayah yang bersangkutan.

2.8 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan adalah analisis *location quotient* (LQ). LQ akan mengidentifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian wilayah terhadap suatu sektor melalui pendekatan perbandingan. Dalam analisis ini, kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi akan dibandingkan dengan wilayah induk atau yang lebih luas. Arsyad (1999)

menjelaskan bahwa teknik analisis *location quotient* (LQ) membagi kegiatan ekonomi daerah menjadi 2 (dua) golongan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Industri basis, merupakan kegiatan industri yang melayani pasar di suatu daerah beserta daerah lain di sekelilingnya
- 2) Industri nonbasis, merupakan kegiatan industri yang hanya melayani pasar di suatu daerah atau wilayah local saja.

Secara matematis, Warpani (2001) menuliskan rumus perhitungan dalam teknik analisis LQ seperti sebagai berikut.

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan :

LQ : Nilai *Location Quotient* (LQ)

Si : PDRB Sektor i Kabupaten Purbalingga

S : PDRB Total Kabupaten Purbalingga

Ni : PDRB Sektor i Provinsi Jawa Tengah

N : PDRB Total Provinsi Jawa Tengah

Apabila perhitungan LQ untuk suatu sektor menghasilkan nilai lebih dari (>) 1 (satu), maka dikatakan sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki kemampuan untuk mengekspor produk yang dihasilkan ke wilayah sekitarnya. Sebaliknya, ketika nilai perhitungan LQ kurang dari (<) 1 (satu), maka sektor tersebut dianggap sebagai sektor non basis. Secara konsep, sektor ini tidak bisa mengekspor produknya ke wilayah lain karena hanya bisa mencukupi kebutuhan di wilayah setempat atau lokal.

Misalkan dalam suatu wilayah, Sektor Industri Pengolahan memiliki hasil perhitungan LQ sebesar 1,67 (lebih dari satu). Maka sektor tersebut dinyatakan sebagai sektor basis dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya di wilayah lokal, tetapi juga di wilayah lain di sekitarnya. Sebaliknya, jika perhitungan LQ misalnya menghasilkan nilai 0,65 (kurang dari satu), maka sektor tersebut dinyatakan sebagai sektor non basis dan hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayah lokal.

Analisis LQ ini memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis yang sederhana namun mampu menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah, sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan, dan perlu dianalisis lebih lanjut karena berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian wilayah. Di sisi lain, teknik analisis ini juga memiliki kelemahan. Teknik LQ merupakan indikator kasar yang secara keseluruhan belum bisa memberikan kesimpulan akhir mengenai sektor-sektor unggulan suatu wilayah. Hal ini tak lain karena asumsi yang digunakan pada LQ ini yang menyatakan pola permintaan dan produktivitas pekerja suatu daerah dan nasional atau wilayah induk adalah sama (Kartikaningdyah, 2012). Terlepas dari kelemahan tersebut, penggunaan analisis LQ ini untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor-sektor yang teridentifikasi.

2.9 Analisis *Shift Share*

Kondisi perekonomian sektoral di suatu daerah juga dapat dianalisis menggunakan teknik *shift share*. teknik ini merupakan teknik yang banyak digunakan ketika menganalisis dampak pertumbuhan regional, khususnya

pertumbuhan lapangan kerja, diterapkan untuk menggambarkan tren pertumbuhan historis, memperkirakan pertumbuhan regional dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis untuk komunitas (Haryanto, 2021).

Pada analisis *shift share*, akan teridentifikasi perubahan suatu sektor di daerah (D_{ij}) untuk periode waktu tertentu. Untuk menemukan koefisien perubahan tersebut, *shift share* menggunakan beberapa variabel yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi di daerah induk atau wilayah yang lebih luas terhadap pertumbuhan suatu sektor di daerah yang diuji (*regional share*/ N_{ij}), bauran industri/*industry mix* suatu sektor di daerah atau perubahan relatif suatu sektor ekonomi daerah terhadap sektor yang sama di wilayah yang lebih luas (*proportional share*/ M_{ij}), dan keunggulan kompetitif suatu sektor di daerah atau *differential shift* (*competitive share*/ C_{ij}) (Soepono, 1993).

Secara matematis, berikut perhitungan dalam analisis *shift share*.

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

D_{ij} : Perubahan sektor i daerah

N_{ij} : Pertumbuhan sektor i daerah (*regional share*)

M_{ij} : Bauran industri sektor i daerah (*industry mix/proportional Share*)

C_{ij} : Keunggulan kompetitif sektor i daerah (*competitive share*)

Masing-masing variabel di atas juga memiliki perhitungan matematisnya masing-masing.

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} \times (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} \times (r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = \frac{(E^*_{ij} - E_{ij})}{E_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(E^*_{in} - E_{in})}{E_{in}}$$

$$r_n = \frac{(E^*_n - E_n)}{E_n}$$

Keterangan :

E_{ij} : Pendapatan sektor i daerah

E^*_{ij} : Pendapatan tahun terakhir sektor i daerah

E_{in} : Pendapatan sektor i provinsi

E^*_{in} : Pendapatan tahun terakhir sektor i provinsi

E_n : Pendapatan provinsi

E^*_n : Pendaoatan tahun terakhir provinsi

r_{ij} : Laju pertumbuhan sektor i daerah

r_{in} : Laju pertumbuhan sektor i provinsi atau wilayah induk yang lebih luas

r_n : Laju pertumbuhan pendapatan provinsi

Dari rumus perhitungan di atas, akan dihasilkan nilai D_{ij} yang digunakan untuk indikator dalam penentuan sektor unggulan. Jika nilai D_{ij} lebih dari ($>$) 0 atau bernilai positif (+), maka sektor tersebut dominan dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Sedangkan jika D_{ij} kurang dari ($<$) 0 atau bernilai negatif (-), maka disinyalir sektor tersebut kurang dominan dan tidak lebih unggul dari wilayah perekonomian yang lebih luas.

Masing-masing komponen pada perhitungan *shift share* juga memiliki makna tertentu. Misalkan Sektor Industri Pengolahan dalam suatu wilayah setelah dilakukan perhitungan dengan analisis *shift share*, didapatkan nilai N_{ij} , M_{ij} , dan C_{ij} bernilai positif (+) yang menyebabkan nilai akhir *shift share* (D_{ij}) juga positif (+). Komponen N_{ij} atau *regional share* yang bernilai positif (+) menunjukkan bahwa sektor tersebut berpotensi untuk meningkat atau mengalami pertumbuhan yang baik. Komponen M_{ij} atau *proportional share* yang positif (+) menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu tumbuh lebih baik dari perekonomian secara keseluruhan di wilayah induk atau wilayah yang lebih besar. Komponen C_{ij} atau *competitive share* yang positif menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki daya saing atau keunggulan komparatif yang tinggi karena memiliki pertumbuhan yang lebih baik pada sektor yang sama di wilayah induk atau wilayah yang lebih besar. Hasil akhir (D_{ij}) yang positif mengindikasikan kinerja perekonomian pada sektor tersebut membaik dan cenderung mengalami pertumbuhan.

2.10 Analisis Overlay

Teknik analisis *overlay* digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan ekonomi yang memiliki potensi dan diunggulkan dibandingkan sektor lainnya. Teknik ini menggunakan kriteria pertumbuhan dan kriteria keunggulan komparatif. Teknik ini dapat dikatakan merupakan proses analisis lanjutan setelah analisis-analisis sebelumnya, dalam hal ini setelah dilakukan analisis dengan teknik *location quotient* (LQ) dan *shift share*. Hasil dari analisis dengan teknik *overlay* adalah penentuan sektor-sektor ekonomi unggulan di daerah.

Sektor unggulan adalah sektor-sektor yang diunggulkan berdasarkan analisis-analisis sebelumnya, dalam hal ini analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift share* (Hajeri, Yurisinthae, & Dolorosa, 2015). Suatu sektor dikatakan sebagai sektor ekonomi unggulan ketika mendapatkan kategori sektor basis berdasarkan analisis LQ dan mendapatkan nilai akhir (D_{ij}) positif berdasarkan analisis *shift share*. Ketika dua kriteria tadi tidak terpenuhi, maka suatu sektor tidak dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi unggulan.

Secara rinci, berikut kriteria sektor ekonomi unggulan berdasarkan analisis *location quotient* (LQ) dan *shift share*.

Tabel II. 1 Kategori Sektor Ekonomi

Analisis LQ	Analisis <i>Shift Share</i>	Kategori
Basis	-	Non Unggulan
Basis	+	Unggulan
-	+	Non Unggulan
-	-	Non Unggulan

Sumber: Diolah oleh Penulis

Misalkan Sektor Industri Pengolahan di suatu wilayah mendapatkan kategori sektor basis pada analisis LQ karena memiliki nilai LQ sebesar 1,67 (lebih dari satu). Sementara pada analisis *Shift Share*, sektor tersebut juga memperoleh hasil akhir (D_{ij}) yang bernilai positif (+). Maka Sektor Industri Pengolahan di wilayah yang di analisis tersebut dikategorikan sebagai sektor ekonomi unggulan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Hajeri, Yurisinthae, & Dolorosa (2015) pada jurnalnya yang berjudul Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya melakukan identifikasi dan analisis terkait sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan. Pada jurnal tersebut, proses penentuan sektor ekonomi unggulan

menggunakan 4 teknik analisis yaitu; *typology klassen*, *location quotient* dan *dynamic location quotient*, *shift share*, dan *overlay*. proses analisis dilakukan menggunakan data *time series* berupa PDRB Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008-2013. Data diolah dengan perhitungan pada teknik *typology klassem location quotient* dan *dynamic location quotient*, dan *shift share*. kemudian hasil perhitungan dikombinasikan dengan teknik *overlay* sehingga diperoleh sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Soepono (1993) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Shift Share: Perkembangan dan Penerapan* menjelaskan konsep penggunaan teknik analisis *shift share* dalam ilmu ekonomi wilayah. Pada jurnal tersebut, Soepono menjabarkan esensi komponen-komponen yang ada pada analisis *shift share*, memahami modifikasi-modifikasinya, hingga manfaatnya dalam analisis wilayah.

Haryanto (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali (Pendekatan LQ dan Shift Share): Kajian Isu Strategis Pembangunan Nasional Transformasi Ekonomi: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa dan Bali* membahas struktur ekonomi di wilayah Jawa dan Bali menggunakan teknik LQ dan *shift share*. Hasil analisis LQ menggambarkan bahwa struktur ekonomi 7 provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2010-2019 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Hasil analisis *shift share* menunjukkan kaitan struktur ekonomi Jawa dan Bali dengan *premature deindustrialisasi*. Atas hasil analisis tersebut, penulis juga memberikan saran kebijakan yang dapat diterapkan di wilayah Jawa dan Bali.

Susilo, et al (2020) jurnalnya yang berjudul *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini* membahas tentang wabah Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Pada jurnal ini dibahas mengenai penyebab Covid-19, Epidemiologi, Virologi, Transmisi, Patogenesis, Faktor Risiko, Manifestasi Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Diagnosis, Tata Laksana, Pencegahan, Komplikasi, hingga Prognosis.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, berbagai metode dapat dilakukan dalam menentukan sektor ekonomi unggulan suatu wilayah. Dalam karya tulis ini, Penulis menggunakan 3 teknik analisis yaitu *location quotient (LQ)*, *shift share*, dan *overlay*. Karya tulis ini tidak hanya menentukan sektor-sektor unggulan, namun juga menganalisis faktor-faktor yang membuat suatu sektor menjadi sektor unggulan, dampak yang diterima dari pandemi Covid-19, dan bagaimana sektor unggulan bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19.